



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
KPKNL Palembang

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
PENGANTAR	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	9
C. Isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
C. Pengukuran Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	51
C. Penghargaan di Tahun 2025.....	52
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	12
Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional.....	12
Tabel II.1 Sasaran Strategis KPKNL Palembang Tahun 2025.....	18
Tabel II.2 Daftar Adendum Target KPKNL Palembang Tahun 2025.....	19
Tabel III.1 Capaian IKU KPKNL Palembang Tahun 2025.....	22
Tabel III.2 Capaian Kinerja IKU 1a-CP.....	23
Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1a-CP 2021 s.d. 2025.....	24
Tabel III.4 Capaian Kinerja IKU 1b-CP.....	25
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1b-CP 2021 s.d. 2025.....	26
Tabel III.6 Capaian Kinerja IKU 2a-CP.....	27
Tabel III.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2a-CP 2021 s.d. 2025.....	28
Tabel III.8 Capaian Kinerja IKU 2b-CP.....	29
Tabel III.9 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2b-CP 2021 s.d. 2025.....	29
Tabel III.10 Capaian Kinerja IKU 2c-CP.....	30
Tabel III.11 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2c-CP 2021 s.d. 2025.....	31
Tabel III.12 Capaian Kinerja IKU 3a-N.....	32
Tabel III.13 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3a-N 2021 s.d. 2025.....	33
Tabel III.14 Capaian Kinerja IKU 3b-CP.....	34
Tabel III.15 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3b-CP 2021 s.d. 2025.....	34
Tabel III.16 Capaian Kinerja IKU 4a-CP.....	35
Tabel III.17 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4a-CP 2021 s.d. 2025.....	36
Tabel III.18 Capaian Kinerja IKU 4b-CP.....	37
Tabel III.19 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4b-CP 2021 s.d. 2025.....	38
Tabel III.20 Capaian Kinerja IKU 5a-CP.....	39
Tabel III.21 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5a-CP 2021 s.d. 2025.....	40
Tabel III.22 Capaian Kinerja IKU 5b-CP.....	40
Tabel III.23 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5b-CP 2021 s.d. 2025.....	41
Tabel III.24 Capaian Kinerja IKU 5c-CP.....	41
Tabel III.25 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5c-CP 2021 s.d. 2025.....	42
Tabel III.26 Capaian Kinerja IKU 6a-CP.....	43
Tabel III.27 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6a-CP 2021 s.d. 2025.....	43
Tabel III.28 Capaian Kinerja IKU 6b-N.....	44
Tabel III.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6b-N 2021 s.d. 2025.....	44
Tabel III.30 Capaian Kinerja IKU 6c-N.....	45

Tabel III.31 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6c-N 2021 s.d. 2025	45
Tabel III.32 Capaian Kinerja IKU 7a-CP	46
Tabel III.33 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 7a-CP 2021 s.d. 2025.....	46
Tabel III.34 Capaian Kinerja IKU 7b-N	47
Tabel III.35 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 7b-N 2021 s.d. 2025	48
Tabel III.36 Capaian Kinerja IKU 8a-N	48
Tabel III.37 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 8a-N 2021 s.d. 2025	49
Tabel III.38 Capaian Kinerja IKU 8b-N	49
Tabel III.39 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 8b-N 2021 s.d. 2025	50
Tabel III.40 Capaian Kinerja IKU 8c-N	51
Tabel III.41 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 8c-N 2021 s.d. 2025	51
Tabel III.42 Penyerapan Anggaran KPKNL Palembang Tahun 2025	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi KPKNL Palembang	11
Gambar II.1 Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2025	18
Gambar III.1 Piagam Penghargaan Lomba Arsip Unit Vertikal DJKN.....	53
Gambar III.2 Piagam Penghargaan Pengelola Kinerja Terbaik Tahun 2025.....	53

PENGANTAR

Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB), bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Palembang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palembang adalah 114,84%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *Stakeholder Perspective* sebesar 32,84%, *Customer Perfective* sebesar 23,51%, *Internal Business Process Perspective* sebesar 28,83%, *Learning and Growth Perspective* sebesar 29,66%. Pencapaian visi dan misi KPKNL Palembang pada tahun 2025 diimplementasikan melalui 8 (delapan) sasaran strategis (SS) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2025, seluruh IKU telah memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi dan dukungan yang baik dengan semua *stakeholders*. KPKNL Palembang menyambut positif hasil pencapaian ini dan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada semua *stakeholders* agar kinerja organisasi dapat semakin meningkat.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta pendorong peningkatan kinerja organisasi DJKN.

Kepala KPKNL Palembang



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Palembang atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Palembang menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2025.

Visi DJKN adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mencapai visi tersebut KPKNL Palembang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Palembang mempunyai 6 (enam) misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (6) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal business process*, dan *learning and growth*. Peta strategi terkait dengan KPKNL Palembang terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective* dan 8 (delapan) sasaran strategis yaitu (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya; (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal; (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa; (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif; (5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif; (6) Pengelolaan keuangan dan BMN

yang akuntabel, serta SDM yang adaptif; (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; serta (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2025 ditetapkan 20 (dua puluh) IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kanwil DJKN SJB dengan Kepala KPKNL Palembang.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 sangat memuaskan yaitu dari total 20 (dua puluh) IKU, semuanya berstatus hijau dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,84%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Untuk itu, KPKNL Palembang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palembang sebagai organisasi berkinerja tinggi (*high performance organization*) semakin meningkat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063), DJKN mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

DJKN adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, DJKN memiliki 4 (empat) misi yang harus diemban dan dilaksanakan sepanjang tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
- b. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
- c. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

KPKNL Palembang merupakan unit eselon III (tiga) di lingkungan DJKN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No 4 Gedung Keuangan Negara Lt. 1-2 Blok C Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. KPKNL Palembang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 2 kota dan 7 kabupaten yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Palembang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;

- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 (lima) unit eselon IV dan pejabat fungsional yang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Gambar I.1 Struktur Organisasi KPKNL Palembang



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Palembang didukung oleh para pegawai dari berbagai bidang keahlian antara lain keuangan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Adapun komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, golongan, umur dan jumlah tenaga fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

URAIAN	PENDIDIKAN					JUMLAH PEGAWAI
	S2	S1/DIV	D3	D1	SMU	
KPKNL Palembang	12	14	3	1	2	32

Sumber : Data HRIS per Desember 2025

Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
II	4
III	19
IV	9
JUMLAH	32

Sumber : Data HRIS per Desember 2025

Tabel I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional

NO.	JABATAN FUNSIONAL	JUMLAH
1 .	Pelelang	5
2 .	Penilai Pemerintah	4
3 .	Pranata Keuangan	1
	JUMLAH	10

Sumber : Data HRIS per Desember 2025

C. Isu Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palembang memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamankan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.

4. Komitmen DJKN dalam mencapai misi bahwa pengelolaan kekayaan negara dapat menjadi salah satu proses bisnis di Kementerian Keuangan.
5. Hasil revaluasi BMN tahun 2018-2019 dijadikan dasar untuk mengukur nilai BMN secara *up to date* dalam skala nasional di Indonesia.
6. Pengembangan teknologi di dalam organisasi untuk menciptakan suatu yang lebih praktis dan efisien khususnya dalam upaya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
7. KPKNL Palembang memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNPBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.
8. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.
2. Bab I Pendahuluan
Menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Bab II Perencanaan Kinerja
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2025.
5. Bab IV Penutup
Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025-2029, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;

3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Palembang telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan pernyataan tindakan yang menjelaskan bagaimana mengimplementasikan prioritas strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi. Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang ingin dicapai KPKNL Palembang pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya. DJKN mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta tepercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku

- kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara.
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif. Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
 5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.
 6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif. Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompotensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
 7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya. Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian

kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif. Dalam rangka *quality assurance* atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

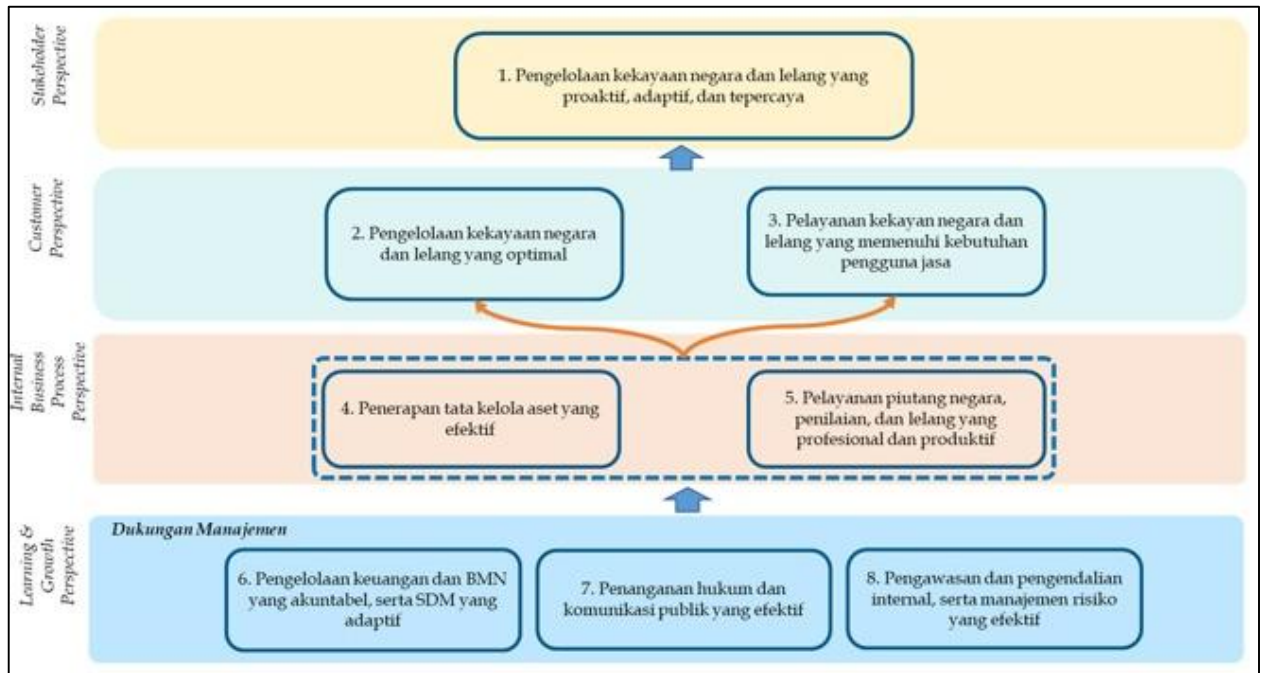
Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Palembang. Sasaran Strategis KPKNL Palembang Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam sebuah Peta Strategi. Peta Strategi DJKN menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*.

Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi hal-hal yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *costumer*. *Internal business process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *costumer*. Terakhir, *learning and growth perspective* berbicara mengenai sumber daya internal yang harus disiapkan untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dalam peta strategi KPKNL Palembang tahun 2025, keempat perspektif diwujudkan melalui 8 (delapan) sasaran strategis yang meliputi (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya; (2) Pengelolaan kekayaan negara

dan lelang yang optimal; (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa; (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif; (5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif; (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif; (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; dan (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Gambar II.1 Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2025



Berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala KPKNL Palembang bersama dengan Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung di tahun 2025, dua puluh IKU ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian delapan sasaran strategis yang ada. Perjanjian kinerja KPKNL Palembang tahun 2025 ditetapkan melalui perjanjian kinerja nomor PK-02/WKN.04/2025 tanggal 31 Januari 2025. Hubungan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis KPKNL Palembang Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%
		8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Pada tahun 2025, perjanjian kinerja KPKNL Palembang mengalami adendum sebanyak satu kali. Adendum ini dilaksanakan terhadap beberapa target IKU dikarenakan capaian IKU-IKU dimaksud pada periode berjalan telah mencapai/melebihi target tahunannya. Adendum perjanjian kinerja KPKNL Palembang ditetapkan melalui adendum perjanjian kinerja nomor PK-02A/WKN.04/2025 tanggal 17 November 2025. Adapun beberapa IKU yang mengalami adendum target antara lain:

Tabel II.2 Daftar Adendum Target KPKNL Palembang tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja	Perubahan Target	
		Semula	Menjadi
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% Rp47.452.300.000	100% Rp54.779.883.000
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%

Kode	Indikator Kinerja	Perubahan Target	
		Semula	Menjadi
		Rp441.300.000.000	Rp750.485.213.000
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100% 8	100% 8,8

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Palembang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian suatu IKU diukur melalui indeks capaian IKU. Indeks capaian IKU merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Penetapan indeks capaian IKU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum 120.
2. Angka minimum 0
3. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0.
4. Ketentuan IKU *maximize* atau *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya,
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan)
 - 3) Memprioritaskan IKU *cascading peta strategi* (CP), kemudian IKU *cascading non peta*, dan IKU *non cascading* dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
5. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Polarisasi *minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

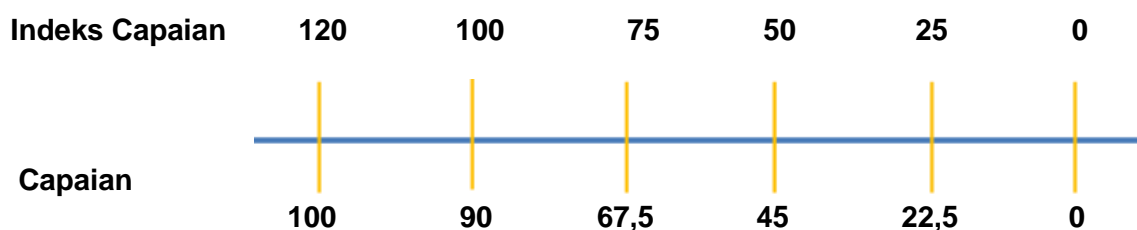
$$\text{Indeks capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right] \times 100$$

c. Polarisasi *stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Dengan grafik sebagai berikut:



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal

C_n = Realisasi/target x 100

C_n = Capaian dengan ketentuan :

- Apabila Realisasi > Target, maka:

$$C_n = 100 - (C_a - 100), \text{ dimana } C_a \text{ maksimum adalah } 200\%$$

- Apabila Realisasi < Target, maka: $C_n = C_a$

C_{n-1} = Angka capaian di bawah C_n

C_{n+1} = Angka capaian di atas C_n

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 KPKNL Palembang telah menetapkan delapan SS dan dua puluh IKU. Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis kinerja yang diuraikan sebagaimana Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1 Capaian IKU KPKNL Palembang Tahun 2025

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120%
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				32,84%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			109,45%
1a-CP	Indeks integritas	100	105,32	105,32%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	115,05%	115,05%
<i>Customer Perspective (20%)</i>				23,51%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			115,13%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	106,67%	106,67%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	124,50%	120,00%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	366,05%	120,00%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			120,00%
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	93,67	120,00%
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	116,57	120,00%
<i>Internal Business Process Perspective (25%)</i>				28,83%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif			110,60%
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	101,21%	101,21%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,00%	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			120,00%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	151,14%	120,00%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	99,48%	120,00%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	115,41%	120,00%
<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>				29,66%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			120,00%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120,00	120,00%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22	120,00%

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	97,55%	120,00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			117,28%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	114,55	114,55%
7b-n	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	116,25	120,00%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			118,70%
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	97,33	119,18%
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%	110,65%	116,11%
8c-n	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	132,52	120,00
NILAI KINERJA ORGANISASI				114,84%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU KPKNL Palembang Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Palembang sebagai berikut:

**Sasaran strategis 1:
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya**

Dalam rangka mengukur keberhasilan atas SS pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya, telah ditetapkan 2 (dua) IKU dengan rincian sebagaimana berikut:

1a-CP Indeks integritas

IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan, khususnya DJKN. Penilaian atas IKU ini menggunakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian IKU indeks integritas pada KPKNL Palembang tahun 2025 adalah sebesar 105,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja IKU 1a-CP

KPKNL Palembang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP	Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120,00	120,00	120,00	144,00	144,00	105,32	105,32	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	144,00%	144,00%	105,32%	105,32%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	105,32%	105,32%	

Isu yang dihadapi DJKN terkait penegakan integritas adalah belum optimalnya sistem pengawasan internal dan keteladanan dan akuntabilitas pimpinan. Selain itu, pengelolaan SDM yang belum optimal, kurangnya orientasi pada pelayanan publik, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi prosedur turut memperburuk situasi. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan celah bagi penyimpangan, rendahnya kualitas layanan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan KPKNL Palembang untuk mendukung pencapaian IKU ini meliputi:

1. Melakukan identifikasi dan pemantauan atas titik rawan (*risk profiling*) praktik gratifikasi;
2. *Campaign*/internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin secara berkala;
3. Identifikasi serta monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
4. Sosialisasi kebijakan antikorupsi, baik itu kepada internal maupun eksternal KPKNL Palembang;
6. Internalisasi ketentuan dan kebijakan penggunaan fasilitas kantor terutama kendaraan dinas;
7. Internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan; dan
8. Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan.

Rencana aksi KPKNL Palembang terhadap IKU ini yaitu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil SPI sesuai arahan dari Kantor Pusat DJKN. Sebagaimana di tahun 2025, DJKN bersama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan telah menyepakati beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan atas hasil SPI di tahun 2024. Dalam hal di tahun 2026 Itjen juga memberikan rekomendasi atas hasil SPI tahun 2025, KPKNL Palembang akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang ada sesuai dengan arahan Kantor Pusat DJKN.

Perbandingan realisasi indeks integritas dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1a-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	88,67	89,17	100
Realisasi	-	-	89,17	92,44	105,32
Capaian			100,56%	103,67%	105,32%

1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari PNBP kekayaan negara (PNBP aset), PNBP Piutang Negara (PNBP PN), dan PNBP lelang.

Target penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Palembang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp54.779.883.000. Kinerja KPKNL Palembang atas penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang telah melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp63.025.563.313 atau 115,05% dari target. Adapun kontribusi dari masing-masing komponen meliputi Rp31.782.500.561 dari PNBP aset, Rp31.013.371.404 dari PNBP lelang, dan Rp229.691.345 dari PNBP PN. Rincian atas target, realisasi, dan capaian atas IKU ini ditunjukkan pada Tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Kinerja IKU 1b-CP

KPKNL Palembang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100% Rp4,2 M	100% Rp14,2 M	100% Rp28,5 M	100% Rp28,4 M	100% Rp28,4 M	100% Rp54,7 M	100% Rp54,7 M	MAX/TLK
Realisasi	295,18% Rp12,3 M	259,03% Rp36,8 M	259,03% Rp36,8 M	192,39% Rp54,7 M	192,39% Rp54,7 M	115,05% Rp63,0 M	115,05% Rp63,0 M	
Capaian	295,18%	259,03%	259,03%	192,39%	192,39%	115,05%	115,05%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	115,05%	115,05%	

Beberapa tantangan yang dihadapi KPKNL Palembang dalam mencapai target PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2025 meliputi:

1. Ada beberapa persetujuan pemanfaatan BMN yang diterbitkan pada tahun 2024 dan awal tahun 2025 belum ditindaklanjuti seluruhnya;
2. Proses lelang sangat tergantung pada permohonan dan sulit diukur potensi laku lelangnya; dan

3. Mayoritas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada KPKNL Palembang merupakan BKPN lama yang telah optimal pengurusannya (debitur tidak diketahui keberadaannya dan tidak mampu untuk melakukan angsuran/pembayaran).

Realisasi capaian PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Palembang didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025, seperti:

1. Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terkait pembayaran sewa BMN;
2. Pelaksanaan wasdal terhadap persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan;
3. Koordinasi dengan mitra satker terkait pemanfaatan BMN, seperti pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan, Zeni Kodam, dsb;
4. Penggalan potensi lelang pada beberapa mitra KPKNL Palembang, seperti kepada beberapa satker, perbankan, dan kejaksaan di wilayah kerja KPKNL Palembang;
5. Sosialisasi terkait lelang, baik itu melalui pertemuan langsung maupun media lain seperti surat, media sosial, dan sebagainya kepada mitra KPKNL Palembang;
6. Koordinasi dan penggalan potensi piutang negara ke penyerah piutang, seperti RSUD Bari, TVRI, dan RRI; dan
7. Optimalisasi penagihan pada debitur potensial, baik itu melalui surat maupun kunjungan langsung.

Kedepannya, KPKNL Palembang akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Upaya penggalan potensi juga akan terus dilakukan sehingga penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dapat meningkat pada periode kinerja berikutnya.

Perbandingan realisasi IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut:

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1b-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100% (Rp28,47 M)	100% (Rp32,36 M)	100% (Rp43,06 M)	100% (Rp54,77 M)
Realisasi	134,45%	148,91% (Rp42,41 M)	150,59% (Rp48,73 M)	121,12% (Rp52,16 M)	115,05% (Rp63,02 M)
Capaian	134,45%	148,91%	150,59%	121,12%	115,05%

**Sasaran strategis 2:
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal**

Terdapat 3 (tiga) IKU yang ditetapkan dalam rangka mengukur keberhasilan atas SS pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, antara lain:

2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan BMN yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

IKU ini diukur berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu subkomponen nilai tingkat optimalisasi pengelolaan aset dan subkomponen penyelesaian pengukuran optimalisasi pengelolaan aset. Adapun capaian IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara KPKNL Palembang pada tahun 2025 adalah sebesar 106,67%. Rincian atas capaian IKU ini adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.6 berikut:

Tabel III.6 Capaian Kinerja IKU 2a-CP

KPKNL Palembang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	50.00%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	113,67%	108,00%	108,00%	105,78%	105,78%	106,67%	106,67%	
Capaian	227,33%	180,00%	180,00%	132,23%	132,23%	106,67%	106,67%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	106,67%	106,67%	

Pada tahun 2025, ditemukan beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara. Yang pertama adalah terdapat BMN sudah tidak digunakan satker tetapi tidak dilakukan perawatan sehingga rusak berat. Akibatnya BMN tersebut menjadi tidak siap untuk digunakan atau dimanfaatkan. Selain itu, masih ditemukan resistensi dari satuan kerja yang tidak ingin

menyerahkan BMN sebagai BMN *idle*. Terakhir, ketidaktersediaan anggaran di satker mengakibatkan satker tidak dapat melaksanakan optimalisasi penggunaan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan verifikasi data target optimalisasi BMN berdasarkan hasil pengukuran SBSK tahun sebelumnya dan data SIMAN;
2. Mengelompokkan jenis BMN berdasarkan potensi penggunaannya dan menyusun langkah tindak lanjut optimalisasi sesuai jenis BMN dan lokasinya;
3. Melakukan sosialisasi penggunaan dan BMN Idle kepada Satuan Kerja;
4. Menyusun rencana optimalisasi penggunaan melalui kegiatan alih status dan pemanfaatan BMN; dan

Rencana aksi KPKNL Palembang kedepannya adalah mempersiapkan kegiatan asistensi bagi satker yang menjadi asetnya menjadi target optimalisasi BMN sehingga pelaksanaan penggunaan maupun pemanfaatan BMN dapat berjalan dengan lancar.

Mengingat IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara merupakan IKU yang baru diimplementasikan pada tahun 2025, IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode-periode sebelumnya.

Tabel III.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2a-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	106,67%
Capaian					106,67%

2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar Rp943.198.394.584 dengan rincian Rp825.779.523.084 merupakan pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I dan

Rp117.418.871.500 merupakan pokok lelang dari pegadaian. Adapun target IKU persentase realisasi pokok lelang KPKNL Palembang tahun 2025 adalah sebesar Rp750.485.213.000 sehingga capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 125,68%. Secara rinci, capaian IKU ini pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel III.8 berikut:

Tabel III.8 Capaian Kinerja IKU 2b-CP

KPKNL Palembang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100% Rp22,0M	100% Rp132,3M	100% Rp132,3M	100% Rp264,7M	100% Rp264,7M	100% Rp750,4M	100% Rp750,4M	MAX/TLK
Realisasi	240,31% Rp53,0M	483,54% Rp640,1M	483,54% Rp640,1M	283,44% Rp750,4M	283,44% Rp750,4M	125,68% Rp943,1M	125,68% Rp943,1M	
Capaian	240,31%	483,54%	483,54%	283,44%	283,44%	125,68%	125,68%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Isu yang dihadapi KPKNL Palembang terkait pencapaian IKU persentase realisasi pokok lelang di tahun 2025 adalah proses lelang yang sangat tergantung pada permohonan yang diajukan oleh pihak penjual. Selain itu, potensi laku suatu objek lelang merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk diukur.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan KPKNL Palembang terkait pencapaian IKU ini meliputi:

1. Penggalan potensi lelang pada beberapa mitra KPKNL Palembang, seperti kepada beberapa satker, perbankan, dan kejaksaan di wilayah kerja KPKNL Palembang; dan
2. Sosialisasi terkait lelang, baik itu melalui pertemuan langsung maupun media lain seperti surat, media sosial, dan sebagainya kepada mitra KPKNL Palembang.

Kedepannya, KPKNL Palembang akan terus menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah, satker, perbankan, kejaksaan, serta pihak-pihak lain yang menjadi mitra lelang KPKNL Palembang. Upaya sosialisasi dan penggalan potensi di bidang lelang juga akan dilaksanakan sehingga diharapkan permohonan lelang pada tahun 2026 dapat meningkat.

Perbandingan capaian IKU persentase realisasi pokok lelang dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Tabel III.9 berikut:

Tabel III.9 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2b-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100% (Rp274,00 M)	100% (Rp255,00 M)	100% (Rp388,70 M)	100% (Rp416,25 M)	100% (Rp750,48 M)
Realisasi	110,45% (Rp302,63 M)	238,72% (Rp608,72 M)	144,21% (Rp560,54 M)	130,31% (Rp542,25 M)	125,68% (Rp943,19 M)
Capaian	110,45%	238,72%	144,21%	130,31%	125,68%

2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU realisasi penurunan nilai saldo piutang negara menggambarkan efektifitas kinerja Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah/Bendahara Umum Negara maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor berupa angsuran/pembayaran baik pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat serta pelunasan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat;
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); dan
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Target IKU realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada KPKNL Palembang di tahun 2025 adalah sebesar Rp900.000.000, sedangkan realisasi IKU dimaksud pada tahun 2025 sebesar Rp3.294.444.990,42 (366,05%). Rincian atas target, realisasi, dan capaian atas IKU ini ditunjukkan pada Tabel III.10 berikut:

Tabel III.10 Capaian Kinerja IKU 2c-CP

KPKNL Palembang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100% Rp300 jt	100% Rp500 jt	100% Rp500 jt	100% Rp700 jt	100% Rp700 jt	100% Rp900 jt	100% Rp900 jt	MAX/TLK
Realisasi	151,31% Rp453,9 jt	117,71% Rp588,5 jt	117,71% Rp588,5 jt	118,58% Rp830,0 jt	118,58% Rp830,0 jt	366,05% Rp3,29 M	366,05% Rp3,29 M	
Capaian	240,31%	483,54%	483,54%	283,44%	283,44%	366,05%	366,05%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tantangan utama yang dihadapi KPKNL Palembang dalam pencapaian IKU realisasi penurunan nilai saldo piutang negara adalah kondisi BKPN pada KPKNL Palembang yang merupakan BKPN lama yang telah optimal pengurusannya (debitur tidak diketahui keberadaannya dan tidak mampu untuk melakukan angsuran/pembayaran).

Beberapa hal yang telah dilakukan KPKNL Palembang untuk mendukung pencapaian persentase penurunan nilai saldo piutang negara selama tahun 2025 antara lain:

1. Koordinasi dan penggalan potensi piutang negara ke penyerah piutang di wilayah kerja KPKNL Palembang;
2. Optimalisasi penagihan pada debitur potensial, baik itu melalui surat maupun kunjungan langsung;
3. Peningkatan proses Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) untuk debitur yang memenuhi syarat; dan
4. Optimalisasi dan percepatan pengurusan piutang debitur potensial.

Rencana aksi KPKNL Palembang terhadap IKU persentase penurunan nilai saldo piutang negara adalah tetap menjaga koordinasi dan hubungan baik dengan para penyerah piutang dan debitur sehingga penyelesaian piutang negara dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, KPKNL Palembang telah merencanakan kegiatan sosialisasi di bidang piutang negara untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* satker terkait pentingnya pengurusan piutang negara. Penggalan potensi di bidang piutang negara juga akan terus dilaksanakan sehingga kasus-kasus piutang negara di wilayah KPKNL Palembang yang potensial untuk diselesaikan dapat terjaring.

Perbandingan capaian IKU persentase penurunan nilai saldo piutang negara KPKNL Palembang dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.11 berikut:

Tabel III.11 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2c-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100% (Rp3,00 M)	100% (Rp5,02 M)	100% (Rp2,00 M)	100% (Rp2,38 M)	100% (Rp900,00 jt)
Realisasi	198,70% (Rp5,96 M)	159,47% (Rp8,01 M)	126,80% (Rp2,54 M)	169,80% (Rp4,04 M)	366,05% (Rp3,29 M)
Capaian	198,70%	159,47%	126,80%	169,80%	366,05%

Sasaran strategis 3:

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

2 (dua) IKU yang ditetapkan dalam rangka mengukur keberhasilan atas SS pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa meliputi:

3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang

diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Komponen yang diukur antara lain:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk layanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Sarana prasarana; dan
9. Sarana pengaduan.

Pada tahun 2025, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan penataan mekanisme survei layanan pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan media digital (e-SKPL). *Output* dari pengolahan data e-SKPL digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk penyusunan laporan survei serta pengisian capaian Indeks/tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) setiap periodik. Hasil penilaian IKPL disampaikan tiap triwulan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar 93,67. Angka ini merupakan rata-rata dari IKPL yang dilaksanakan tiap triwulan. Target IKU indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2025 adalah sebesar 77 sehingga capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 121,65%. Secara rinci, capaian IKU ini pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel III.12 berikut:

Tabel III.12 Capaian Kinerja IKU 3a-N

KPKNL Palembang	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	MAX/AVG
Realisasi	88,69	94,40	91,55	94,80	92,63	96,80	93,67	
Capaian	115,18%	122,60%	118,90%	123,11%	120,30%	125,71%	121,65%	
Nilai Kinerja	115,18%	120,00%	118,90%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tantangan yang dihadapi KPKNL Palembang dalam mencapai target IKPL yaitu masih rendahnya jumlah pengguna layanan yang mau berpartisipasi dalam pengisian e-SKPL yang telah disampaikan KPKNL Palembang. Rendahnya tingkat partisipasi ini salah

satunya disebabkan karena petugas layanan KPKNL Palembang tidak rutin mengingatkan ke pengguna layanan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan KPKNL Palembang untuk mendukung pencapaian IKU IKPL antara lain:

1. Menyampaikan tautan survei kepuasan pengguna layanan kepada pengguna layanan;
2. Menempatkan *link barcode* e-SKPL pada *front office* KPKNL Palembang; dan
3. Mengingatkan para pegawai yang sedang bertugas di APT untuk mengarahkan pengguna layanan agar mengisi survei pengguna layanan melalui *barcode* yang tersedia.

KPKNL Palembang akan terus berupaya dalam meningkatkan jumlah partisipasi pengguna layanan dalam pengisian e-SKPL. Unit pemberi layanan di KPKNL Palembang akan terus diberdayakan dalam membantu penyebaran tautan survei. Tindak lanjut atas hasil e-SKPL juga terus dipantau sehingga diharapkan IKPL pada KPKNL Palembang kedepannya dapat terus meningkat.

Perbandingan capaian IKU IKPL pada KPKNL Palembang dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.13 berikut:

Tabel III.13 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3a-N 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	4,60	4,62	-	-	77
Realisasi	4,75	4,79	-	-	93,67
Capaian	103,26%	103,68%			121,65%

3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Di KPKNL Palembang, IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang dan indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara.

Tabel III.14 menunjukkan rincian atas kinerja KPKNL Palembang dalam mencapai IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi. Capaian IKU ini pada KPKNL Palembang pada tahun 2025 adalah sebesar 157,53%. Target yang ditetapkan sebesar 74 dan realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 116,57.

Tabel III.14 Capaian Kinerja IKU 3b-CP

KPKNL Palembang	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	MAX/AVG
Realisasi	100,00	118,76	109,38	127,50	115,42	120,00	116,57	
Capaian	135,14%	160,47%	147,81%	172,30%	155,97%	162,16%	157,76%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Salah satu isu yang dihadapi KPKNL Palembang dalam mencapai IKU ini adalah adanya keterbatasan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan komunikasi. Berkaitan dengan isu dimaksud, Jafung Pelelang dan Seksi Piutang Negara KPKNL Palembang selaku pelaksana kegiatan telah berkoordinasi dengan bagian umum terkait revisi anggaran.

Dalam periode tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) edukasi dan komunikasi lelang dan piutang negara tahun 2025;
2. Sosialisasi dan edukasi lelang kepada mitra perbankan di wilayah kerja KPKNL Palembang; dan
3. Sosialisasi dan edukasi pengurusan piutang negara kepada para penyerah piutang (RSUD Palembang BARI, BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, TVRI Palembang, RRI Palembang, Pemerintah Provinsi Sumsel)

Pada tahun 2026, koordinasi terkait kebutuhan anggaran akan dilakukan sejak awal tahun sehingga pelaksanaan edukasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan semakin berkualitas.

Dalam lima tahun terakhir, perbandingan capaian IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi KPKNL Palembang adalah sebagaimana terlihat pada tabel III.15 berikut:

Tabel III.15 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3b-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	90,5	91	-	-	74
Realisasi	90,98	91,85	-	-	116,57
Capaian	100,53%	100,93%			157,76%

**Sasaran strategis 4:
Penerapan tata kelola aset yang efektif**

Dalam rangka mengukur keberhasilan atas SS penerapan tata kelola aset yang efektif, 2 (dua) IKU yang telah ditetapkan meliputi:

4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, *update* dan validasi di SIMAN (K4).

IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk *output*-nya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Di samping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, dan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

Tabel III.16 Capaian Kinerja IKU 4a-CP

KPKNL Palembang	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	5% 62	40% 496	40% 496	60% 744	60% 744	100% 1.240	100% 1.240	MAX/TLK
Realisasi	44,76% 555	81,13% 1.006	81,13% 1.006	86,77% 1.076	86,77% 1.076	101,21% 1.255	101,21% 1.255	
Capaian	895,16%	202,82%	202,82%	144,62%	144,62%	101,21%	101,21%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	101,21%	101,21%	

Tabel III.16 memberi gambaran pencapaian IKU ini pada KPKNL Palembang di tahun 2025. Target sertifikasi BMN tanah tahun 2025 pada KPKNL Palembang adalah sebanyak 1.240 bidang tanah. Adapun realisasi IKU ini sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1.255 bidang tanah. Dengan demikian capaian KPKNL Palembang atas IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan adalah sebesar 101,21%.

Beberapa tantangan yang dihadapi KPKNL Palembang dalam mencapai target IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan meliputi:

1. Terdapat bidang tanah pengadaan lama yang dokumennya tidak lengkap;
2. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan bidang tanah milik negara yang perlu dilakukan pemecahan sertifikat karena tergabung dengan tanah milik masyarakat, tetapi belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dari satker;
3. Terdapat bidang tanah dikuasai masyarakat; dan
4. Terdapat hak lain di bidang tanah, namun dokumen peralihan aset (pembelian/pengadaan/hibah masuk) tidak ditemukan.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan KPKNL Palembang untuk mendukung pencapaian IKU ini meliputi:

1. Koordinasi dengan satker-satker yang menjadi target sertifikasi BMN tanah;
2. Koordinasi dengan kantor pertanahan dalam rangka *monitoring progress* sertifikasi BMN tanah; dan
3. Pembuatan nota kesepakatan penyelesaian sertifikasi hulu migas bersama SKK Migas KKKS dan Kantor Pertanahan.

Rencana aksi KPKNL Palembang terhadap IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan adalah tetap menjaga koordinasi dan hubungan baik dengan para satker, SKK Migas KKKS, serta kantor pertanahan di wilayah kerja KPKNL Palembang sehingga proses penyelesaian target sertifikasi BMN tanah dapat berjalan lancar.

Perbandingan capaian KPKNL Palembang terkait IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.17 berikut:

Tabel III.17 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4a-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100% (489)	100% (440)	100% (1.935)	100% (1.254)	100% (1.240)
Realisasi	108,18% (529)	102,27% (450)	116,69% (2.350)	193,30% (2.424)	101,21% (1.255)
Capaian	108,18%	102,27%	116,69%	193,30%	101,21%

4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan enam indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti.

IKU ini diukur dengan 2 (dua) komponen. Komponen pertama (Komponen A) mengukur jumlah aset yang telah dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya, sedangkan komponen kedua (Komponen B) mengukur jumlah aset yang rekomendasinya telah ditindaklanjuti. Di KPKNL Palembang, target masing-masing komponen di tahun 2025 adalah 837 NUP untuk komponen A dan 42 NUP untuk komponen B. Penghitungan capaian total menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks capaian IKU} = (\text{Komponen A} \times 50\%) + (\text{Komponen B} \times 50\%)$$

Capaian IKU persentase evaluasi kinerja BMN pada KPKNL Palembang di tahun 2025 adalah sebesar 120%. Capaian ini dihitung berdasarkan realisasi di tahun 2025 sebesar 1.201 NUP dengan target tahunan sebesar 879 NUP. Tabel III.18 memperlihatkan detail capaian pada KPKNL Palembang atas IKU ini.

Tabel III.18 Capaian Kinerja IKU 4b-CP

KPKNL Palembang	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	15% 132	50% 440	50% 440	75% 660	75% 660	100% 879	100% 879	MAX/TLK
Realisasi	10,08% 173	78,82% 462	78,82% 462	88,38% 641	88,38% 641	120,00% 1.201	120,00% 1.201	
Capaian	67,22%	157,63%	157,63%	117,83%	117,83%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	67,22%	120,00%	120,00%	117,83%	117,83%	120,00%	120,00%	

Isu utama yang dihadapi KPKNL Palembang dalam pencapaian IKU persentase evaluasi kinerja BMN adalah satuan kerja masih memerlukan adaptasi dalam menggunakan aplikasi SIMAN V2 modul portofolio sehingga masih terdapat kendala

penggunaan aplikasi pada saat penyelesaiannya. Untuk menangani isu dimaksud, beberapa hal yang telah dilakukan KPKNL Palembang antara lain:

1. Melakukan pemetaan BMN dalam rangka percepatan penyelesaian perhitungan evaluasi kinerja BMN;
2. Berkoordinasi dengan satuan kerja untuk menindaklanjuti dan memberikan sosialisasi terkait bentuk tindak lanjut rekomendasi yang dapat dilakukan; dan
3. Edukasi ke satuan kerja terkait evaluasi kinerja BMN.

Langkah KPKNL Palembang untuk mencapai target IKU persentase evaluasi kinerja BMN ke depannya adalah menjaga koordinasi dengan satker yang BMN-nya menjadi target portofolio aset sehingga penyelesaian rekomendasi dapat berjalan dengan baik. KPKNL Palembang juga akan terus memberikan asistensi bagi para operator BMN terkait aplikasi SIMAN V2, khususnya terkait modul portofolio.

Perbandingan realisasi IKU persentase evaluasi kinerja BMN dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Tabel III.19 berikut:

Tabel III.19 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4b-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100% (143)	100% (238)	100% (169)	100% (181)	100% (879)
Realisasi	106,29% (152)	123,03% (324)	100,00% (169)	120,09% (218)	120,00% (1.201)
Capaian	106,29%	123,03%	100,00%	120,09%	120,00%

Sasaran strategis 5:

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Keberhasilan atas SS pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif diukur dengan 3 (tiga) IKU yang meliputi:

5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, IKU ini juga menggambarkan K/L/Pemda dalam mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan realisasi penyelesaian berkas piutang negara sebagai kriteria capaian IKU meliputi:

1. Realisasi penyelesaian berkas piutang negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dengan bobot komponen 1,2;
2. Realisasi penyelesaian berkas piutang negara melalui PUPN yang tidak menghasilkan penerimaan Negara dengan bobot komponen 1,1; dan
3. Realisasi penyelesaian berkas piutang negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal dengan bobot komponen 1.

Target KPKNL Palembang terkait IKU persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara pada tahun 2025 adalah sebesar 8,8. Realisasi atas IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar 13,30 sehingga capaian yang diperoleh di tahun 2025 adalah 151.14%. Rincian atas pencapaian IKU persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara dapat dilihat pada Tabel III.20 berikut:

Tabel III.20 Capaian Kinerja IKU 5a-CP

KPKNL Palembang	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100% 4,00	100% 5,00	100% 5,00	100% 6,00	100% 6,00	100% 8,80	100% 8,80	MAX/TLK
Realisasi	110,00% 4,40	120,00% 6,00	120,00% 6,00	146,67% 8,80	146,67% 8,80	151,14% 13,30	151,14% 13,30	
Capaian	110,00%	132,00%	132,00%	146,67%	146,67%	151,14%	151,14%	
Nilai Kinerja	110,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tantangan utama yang dihadapi KPKNL Palembang dalam pencapaian IKU persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara adalah kondisi BKPN pada KPKNL Palembang yang merupakan BKPN lama yang telah optimal pengurusannya (debitur tidak diketahui keberadaannya dan tidak mampu untuk melakukan angsuran/pembayaran). Beberapa hal yang telah dilakukan KPKNL Palembang untuk mengoptimalkan penurunan nilai saldo piutang negara selama tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dan penggalian potensi piutang negara ke penyerah piutang di wilayah kerja KPKNL Palembang. Selain itu, KPKNL Palembang juga melakukan optimalisasi penagihan pada debitur potensial, baik itu melalui surat maupun kunjungan langsung.

Rencana aksi KPKNL Palembang terhadap IKU persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara adalah tetap menjaga koordinasi dan hubungan baik dengan para penyerah piutang dan debitur sehingga penyelesaian piutang negara dapat berjalan dengan lancar. Rencana kegiatan penggalian potensi di bidang piutang negara juga telah

diagendakan sehingga kasus-kasus piutang negara di wilayah KPKNL Palembang yang potensial untuk diselesaikan dapat terjaring.

Tabel III.21 menunjukkan kinerja KPKNL Palembang terkait IKU persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara dalam lima tahun terakhir.

Tabel III.21 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5a-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100% (133)	100% (30)	100% (45)	100% (37)	100% (8,8)
Realisasi	102,26% (136)	483,33% (145)	110,00% (55)	127,03% (47)	151,14% (13,30)
Capaian	102,26%	483,33%	110,00%	127,03%	151,14%

5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui layanan penilaian yang tepat waktu, basis data yang akurat dan hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Capaian IKU ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen. Komponen pertama yaitu norma waktu layanan penilaian dengan bobot 40%. Komponen ini mengukur lamanya proses penilaian, dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Komponen kedua adalah akurasi data layanan penilaian (bobot 30%) yang mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP). Komponen terakhir yaitu nilai hasil kaji ulang laporan penilaian (bobot 30%) yang diukur dengan cara menghitung persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.

Capaian IKU tingkat kualitas layanan penilaian pada KPKNL Palembang di tahun 2025 adalah 142,12%. Realisasi pada IKU ini adalah sebesar 99,48% dan target yang ditetapkan sebesar 70%. Detil capaian IKU ini ditunjukkan pada Tabel III.22 sebagai berikut:

Tabel III.22 Capaian Kinerja IKU 5b-CP

KPKNL Palembang	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	70.00%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/AVG
Realisasi	100,76%	103,05%	101,91%	99,78%	101,20%	94,33%	99,48%	
Capaian	143,94%	147,21%	145,59%	142,54%	144,57%	134,76%	142,12%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tingkat kualitas layanan penilaian pada KPKNL Palembang adalah masih terdapat pemohon penilaian dari eksternal yang belum seluruhnya melakukan *input* permohonan pada SIP. Berkaitan dengan kendala ini, beberapa upaya yang telah dilakukan KPKNL Palembang antara lain:

1. Asistensi kepada para pemohon penilaian terkait proses *input* permohonan pada SIP;
2. Melakukan koordinasi dengan pemohon penilaian;
3. Optimalisasi penggunaan SIP bagi pemohon eksternal; dan
4. Pengiriman surat resmi kepada pemohon penilaian yang belum melakukan *input* data pada SIP.

Di tahun 2026, KPKNL Palembang akan terus memberikan asistensi kepada para pemohon penilaian, khususnya pemohon eksternal terkait *input* permohonan pada SIP. Diharapkan melalui kegiatan ini, *awareness* dan kepatuhan pemohon penilaian terkait pemenuhan administrasi penilaian di SIP dapat meningkat.

Mengingat IKU tingkat kualitas layanan penilaian merupakan IKU yang baru diimplementasikan pada tahun 2025, IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode-periode sebelumnya.

Tabel III.23 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5b-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	-	70%
Realisasi	-	-	-	-	99,48%
Capaian					142,12%

5c-CP Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang, dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tabel III.24 Capaian Kinerja IKU 5c-CP

KPKNL Palembang	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP	Persentase produktivitas lelang						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	57,69%	77,05%	77,05%	114,67%	114,67%	115,41%	115,41%	
Capaian	192,29%	192,63%	192,63%	163,81%	163,81%	144,26%	144,26%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tabel III.24 menunjukkan uraian capaian IKU persentase produktivitas lelang di tahun 2025. Target tahun 2025 pada KPKNL Palembang adalah 80%. Adapun realisasi IKU ini di tahun 2025 sebesar 115,41%. Dengan demikian capaian IKU persentase produktivitas lelang pada KPKNL Palembang di tahun 2025 adalah sebesar 144,26%.

Isu yang dihadapi KPKNL Palembang terkait pencapaian IKU persentase produktivitas lelang di tahun 2025 adalah proses lelang yang sangat tergantung pada permohonan yang diajukan oleh pihak penjual. Selain itu, potensi laku suatu objek lelang merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk diukur.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan KPKNL Palembang terkait pencapaian IKU ini meliputi:

1. Penggalan potensi lelang pada beberapa mitra KPKNL Palembang, seperti kepada beberapa satker, perbankan, dan kejaksaan di wilayah kerja KPKNL Palembang; dan
2. Sosialisasi terkait lelang, baik itu melalui pertemuan langsung maupun media lain seperti surat, media sosial, dan sebagainya kepada mitra KPKNL Palembang.

Kedepannya, KPKNL Palembang akan terus menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah, satker, perbankan, kejaksaan, serta pihak-pihak lain yang menjadi mitra lelang KPKNL Palembang. Upaya sosialisasi dan penggalan potensi di bidang lelang juga akan dilaksanakan sehingga diharapkan permohonan lelang pada tahun 2026 dapat meningkat.

Capaian IKU persentase produktivitas lelang pada KPKNL Palembang dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel III.25 sebagaimana berikut:

Tabel III.25 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5c-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	35%	36%	80%	89%	80%
Realisasi	43,82%	37,31%	141,68%	114,94%	115,41%
Capaian	125,20%	103,64%	177,10%	129,14%	144,26%

**Sasaran strategis 6:
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**

KPKNL Palembang menetapkan 3 (tiga) IKU untuk mengukur keberhasilan atas SS Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, antara lain:

6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran pada unit kerja. Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penjumlahan dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran (bobot 50%) dan nilai kinerja atas pelaksanaan

anggaran (bobot 50%). Di tahun 2025, capaian IKU indeks kualitas kinerja anggaran pada KPKNL Palembang adalah 120%. Adapun rincian IKU ini di tahun 2025 terlihat pada Tabel III.26 berikut:

Tabel III.26 Capaian Kinerja IKU 6a-CP

KPKNL Palembang	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120,00	119,00	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Capaian	120,00%	119,00%	119,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	120,00%	119,00%	119,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Isu yang dihadapi KPKNL Palembang dalam pencapaian IKU indeks kualitas kinerja anggaran adalah adanya kebijakan efisiensi atas anggaran belanja tahun anggaran 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran sehingga mempengaruhi capaian. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target IKU indeks kualitas kinerja anggaran adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala. Kedepannya, kegiatan ini akan terus dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang ada.

Tabel III.27 memperlihatkan perkembangan capaian IKU indeks kualitas kinerja anggaran KPKNL Palembang dari tahun 2021 s.d. 2025.

Tabel III.27 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6a-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	95,5%	95,5%	100%	100%	100%
Realisasi	95,95%	93,45%	99,65%	120,00%	120,00%
Capaian	100,47%	97,85%	99,65%	120,00%	120,00%

6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dihitung dari 2 (dua) komponen. Komponen pertama adalah kualitas pengelolaan pengadaan yang diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri. Komponen kedua meliputi indeks tata kelola pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Realisasi IKU indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa KPKNL Palembang di tahun 2025 adalah sebesar 125,22, sedangkan target pada IKU dimaksud adalah sebesar 100. Dengan demikian capaian IKU ini di tahun 2025 adalah sebesar 125,22%.

Tabel III.28 menunjukkan rincian atas capaian IKU indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa:

Tabel III.28 Capaian Kinerja IKU 6b-N

KPKNL Palembang	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	160,00	145,71	145,71	135,00	135,00	125,22	125,22	
Capaian	160,00%	145,71%	145,71%	135,00%	135,00%	125,22%	125,22%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tantangan yang dihadapi KPKNL Palembang dalam pencapaian IKU ini di tahun 2025 adalah penggunaan Digipay belum maksimal. Hal ini terjadi karena masih banyak mitra/*vendor* KPKNL Palembang yang belum terdaftar pada Digipay. Berkaitan dengan hal ini, KPKNL Palembang telah meminta rekanan *vendor* agar membuat akun di Digipay dan berkoordinasi dengan pihak bank untuk mendapatkan mesin EDC sehingga pengadaan secara e-purchasing di KPKNL Palembang dapat menjadi semakin mudah. Kedepannya, KPKNL Palembang akan terus memaksimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi pengadaan yang telah berjalan. Pengadaan KPKNL Palembang kedepannya juga akan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berlaku, misalnya terkait kebijakan penggunaan produk dalam negeri.

Perbandingan capaian IKU indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Tabel III.29 berikut:

Tabel III.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6b-N 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	100	100	-	100
Realisasi	-	104,98	225,40	-	125,22
Capaian		104,98%	225,40%		125,22%

6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKI ini mengukur 2 (dua) komponen, yaitu penguatan budaya dan bintal pejabat administrator serta pemenuhan Jam Pelatihan (JP) dan pemanggilan pelatihan. Komponen pertama wajib dilaksanakan oleh Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja. Bentuk penguatan budaya dan pembinaan meliputi kegiatan pembinaan mental dan kegiatan sinergi antar generasi. Komponen kedua mewajibkan bawahan pada unit kerja untuk memenuhi minimal 25 JP serta mengikuti panggilan diklat yang ada.

Target tahunan IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2025 adalah sebesar 80%. Realisasi pada KPKNL Palembang adalah sebesar 97,55%. dengan demikian, capaian IKU ini di tahun 2025 sebesar 121,93%. Rincian atas capaian KPKNL Palembang dapat dilihat pada Tabel III.30 berikut:

Tabel III.30 Capaian Kinerja IKU 6c-N

KPKNL Palembang	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							POL/KP
	6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	34,12%	68,74%	68,74%	82,50%	82,50%	97,55%	97,55%	
Capaian	170,61%	171,86%	171,86%	137,50%	137,50%	121,93%	121,93%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Pada tahun 2025, tidak ditemukan adanya kendala berarti dalam pencapaian IKU. Seluruh pegawai di KPKNL Palembang telah mengikuti diklat minimal 25 JP serta memenuhi panggilan diklat yang ada. Kegiatan penguatan budaya yang meliputi kegiatan pembinaan mental dan kegiatan sinergi antar generasi juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

KPKNL Palembang akan terus mendorong pegawai di lingkungannya untuk terus mengikuti diklat dalam rangka pengembangan kompetensi. Pegawai dapat mengikuti diklat yang sifatnya *open access* melalui <https://klc2.kemenkeu.go.id/>. Selain itu, pegawai juga dapat mengusulkan diklat yang ingin diikuti melalui aplikasi diklat DJKN pada tautan <https://diklatdjkn.kemenkeu.go.id>.

Capaian IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai KPKNL Palembang dari tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.31 berikut:

Tabel III.31 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6c-N 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%	100%	80%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	118,86%	97,55%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	118,86%	121,93%

**Sasaran strategis 7:
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**

2 (dua) IKU yang ditetapkan dalam rangka mengukur keberhasilan atas SS penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif meliputi:

7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen, yaitu indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan (bobot 80%) dan indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap (bobot 20%). Indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan mengukur ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat *relaas* gugatan/panggilan sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Komponen kedua mengukur bagaimana akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim mempengaruhi tugas dan fungsi DJKN.

Capaian IKU indeks penanganan permasalahan hukum KPKNL Palembang pada tahun 2025 adalah 114,55%. Realisasi pada IKU ini adalah sebesar 114,55 dan target yang ditetapkan sebesar 100. Detil capaian IKU ini terlihat pada Tabel III.32 berikut:

Tabel III.32 Capaian Kinerja IKU 7a-CP

KPKNL Palembang	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	113,79	109,89	109,89	113,18	113,18	114,55	114,55	
Capaian	113,79%	109,89%	109,89%	113,18%	113,18%	114,55%	114,55%	
Nilai Kinerja	113,79%	109,89%	109,89%	113,18%	113,18%	114,55%	114,55%	

Salah satu hal yang berpengaruh dalam pencapaian IKU indeks penanganan permasalahan hukum KPKNL Palembang adalah penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU) yang menjadi dasar penugasan pegawai dalam beracara di pengadilan memerlukan waktu yang tidak singkat. Seringkali, surat pemanggilan dari pengadilan sudah diterima KPKNL Palembang ketika SKU dari Kantor Pusat belum terbit. Untuk mengatasi kondisi tersebut, KPKNL Palembang secara aktif telah berkoordinasi dengan PIC Kantor Pusat sehingga penerbitan SKU dapat berjalan dengan cepat.

Tabel III.33 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 7a-CP 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	114,55
Capaian					114,55%

Tabel III.33 menunjukkan perkembangan IKU indeks penanganan permasalahan hukum dari tahun 2021 s.d. 2025. Mengingat IKU ini merupakan IKU yang baru diimplementasikan pada tahun 2025, IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode-periode sebelumnya.

7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Realisasi IKU PPID KPKNL Palembang pada tahun 2025 adalah 116,25. Target IKU dimaksud di tahun 2025 adalah sebesar 80, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 145,31%. Detil capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel III.34 berikut:

Tabel III.34 Capaian Kinerja IKU 7b-N

KPKNL Palembang	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/AVG
Realisasi	115,00	117,00	116,00	118,00	116,67	115,00	116,25	
Capaian	143,75%	146,25%	145,00%	147,50%	145,84%	143,75%	145,31%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Isu yang dihadapi KPKNL Palembang terkait PPID adalah tidak lengkapnya berkas/dokumen pemohon informasi saat mengajukan permohonan informasi publik. Berkaitan dengan hal ini, KPKNL Palembang telah menyampaikan surat secara resmi kepada pemohon informasi sehingga yang bersangkutan dapat segera menyampaikan kelengkapan dokumen dan proses permohonan informasi dapat dilanjutkan. Kedepannya, KPKNL Palembang akan terus melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala sehingga informasi publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan

Tabel III.35 memperlihatkan perbandingan IKU PPID KPKNL Palembang dalam lima tahun terakhir.

Tabel III.35 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 7b-N 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	80	80
Realisasi	-	-	-	100	116,25
Capaian				120,00%	145,31%

Sasaran strategis 8:

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

KPKNL Palembang menetapkan 3 (tiga) IKU untuk mengukur keberhasilan atas SS pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif, antara lain:

8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Tabel III.36 Capaian Kinerja IKU 8a-N

KPKNL Palembang	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	80,00	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	95,55	94,51	94,51	96,33	96,33	97,33	97,33	
Capaian	119,44%	118,13%	118,13%	120,42%	120,42%	121,66%	121,66%	
Nilai Kinerja	119,44%	118,13%	118,13%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Target IKU IKMR di tahun 2025 adalah sebesar 80. Realisasi KPKNL Palembang di tahun 2025 yaitu 97,33%, sehingga capaian yang diperoleh KPKNL Palembang adalah 121,66%. Secara rinci, capaian atas IKU IKMR dapat dilihat pada Tabel III.36 di atas.

Pada tahun 2025, tidak ditemukan adanya kendala berarti dalam pencapaian IKU. Seluruh pegawai di KPKNL Palembang telah memenuhi kewajiban pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan. Manajemen kinerja dan risiko organisasi di KPKNL Palembang juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. KPKNL Palembang akan terus menjalankan kegiatan terkait manajemen kinerja dan risiko sesuai *timeline* sehingga kualitas pengelolaan kinerja dan risiko di KPKNL Palembang dapat tetap terjaga.

Perkembangan capaian IKU IKMR KPKNL Palembang dari tahun 2021 s.d. 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.37 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 8a-N 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	75	80	-	85	80
Realisasi	91,20	88,51	-	96,22	97,33
Capaian	121,60%	110,64%		113,20%	121,66%

8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa rekomendasi *policy recommendation*, rekomendasi hukuman disiplin, dan rekomendasi hasil pengawasan selain *policy recommendation*. IKU ini terdiri atas 4 (empat) komponen penilaian (sub IKU) yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut *policy recommendation*;
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec);
3. Persentase ketepatan waktu tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec); dan
4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hukdis oleh IBI.

Tabel III.38 Capaian Kinerja IKU 8b-N

KPKNL Palembang	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	75,50%	82,50%	82,50%	89,75%	89,75%	95,30%	95,30%	MAX/TLK
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	110,65%	110,65%	110,65%	110,65%	
Capaian	132,45%	121,21%	121,21%	123,29%	123,29%	116,11%	116,11%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,11%	116,11%	

Tabel III.38 menunjukkan uraian pencapaian IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada KPKNL Palembang di tahun 2025. Capaian IKU ini adalah sebesar 116,11%. Capaian ini dihitung berdasarkan realisasi di tahun 2025 sebesar 110,65% dengan target tahunan sebesar 95,30%.

Pada tahun 2025, tidak ditemukan adanya kendala berarti dalam pencapaian IKU. Seluruh rekomendasi dari Itjen telah ditindaklanjuti KPKNL Palembang sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Penyampaian bukti tindak lanjut disampaikan baik itu melalui nota dinas ke Inspektur IV maupun dengan mengunggah bukti tindak lanjut pada aplikasi TeamMate+. Tindak lanjut atas rekomendasi yang ada telah diverifikasi dan dinyatakan tuntas oleh Itjen.

Perbandingan capaian IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti KPKNL Palembang dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.39 berikut:

Tabel III.39 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 8b-N 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	98%	95,30%
Realisasi	-	-	-	100%	110,65%
Capaian				102,04%	116,11%

8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00;
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50; dan
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar 132,52. Adapun target IKU indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM KPKNL Palembang tahun 2025 adalah 100 sehingga capaian pada tahun 2025 adalah sebesar

132,52%. Secara rinci, capaian IKU ini pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel III.40 berikut:

Tabel III.40 Capaian Kinerja IKU 8c-N

KPKNL Palembang	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	POL/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	132,52	132,52	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	132,52%	132,52%	
Nilai Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tantangan yang dihadapi KPKNL Palembang dalam mencapai target IKU ini yaitu beberapa pelaksanaan kegiatan keberlanjutan ZI WBK tidak sesuai dengan rencana kerja. Beberapa upaya yang telah dilakukan KPKNL Palembang untuk mendukung pencapaian IKU indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM antara lain:

1. Melakukan penyusunan SK Tim Kerja ZI-WBK/WBBM;
2. Melakukan penyusunan SK rencana kerja ZI-WBK/WBBM; dan
3. Melaksanakan kegiatan monev rencana kerja ZI-WBK/WBBM secara berkala.

Kegiatan pembangunan ZI di KPKNL Palembang kedepannya akan terus dilakukan. Di tahun 2026, kegiatan akan difokuskan pada pembangunan ZI WBBM. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja ZI-WBBM dan *monitoring* atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud akan tetap dilanjutkan pada tahun 2026.

Capaian IKU terkait pembangunan ZI-WBK/WBBM pada KPKNL Palembang dari tahun 2021 s.d. 2025 terlihat pada Tabel III.41 berikut:

Tabel III.41 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 8c-N 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	75	-	100	-	100
Realisasi	96,67	-	120	-	132,52
Capaian	128,89%		120,00%		132,52%

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, KPKNL Palembang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.391.353.000. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palembang. Dari alokasi anggaran yang ada, realisasi anggaran yang telah dilaksanakan KPKNL Palembang selama tahun 2025 adalah sebesar Rp2.239.510.047 (93,65%). Rincian atas penyerapan anggaran KPKNL Palembang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel III.42 berikut.

Tabel III.42 Penyerapan Anggaran KPKNL Palembang Tahun 2025

Program/Kegiatan 2025	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi s.d. 31 Desember 2025	
		(Rp)	%
Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko	644.648.000	577.764.566	89,62%
• Komunikasi, edukasi, dan standardisasi	46.102.000	38.023.755	82,48%
• Pengelolaan aset	598.546.000	539.740.811	90,18%
Dukungan Manajemen	1.746.705.000	1.661.745.481	95,14%
• Legislasi dan litigasi	37.938.000	34.100.000	89,88%
• Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	1.666.092.000	1.592.074.081	95,56%
• Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	29.408.000	24.122.400	82,03%
• Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	13.267.000	11.449.000	86,30%
TOTAL	2.391.353.000	2.239.510.047	93,65%

Pelaksanaan anggaran KPKNL Palembang di tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi. Pelaksanaan efisiensi didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Menindaklanjuti kebijakan efisiensi, KPKNL Palembang telah menyesuaikan rencana kegiatan sesuai dengan pagu revisi yang ditetapkan.

Untuk memastikan penyerapan anggaran yang optimal, beberapa upaya yang telah dilakukan KPKNL Palembang di tahun anggaran 2025 meliputi:

1. Penyesuaian rencana program/kegiatan KPKNL Palembang sesuai dengan pagu revisi setelah efisiensi; dan
2. Monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala untuk mengurangi deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran.

C. Penghargaan di Tahun 2025

Pada tahun 2025, KPKNL Palembang berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, baik itu dari internal Kementerian Keuangan maupun dari pihak eksternal. Beberapa penghargaan dimaksud antara lain:

1. Juara Harapan I pada Lomba Arsip Unit Vertikal DJKN yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Hari Kekayaan Negara Tahun 2025.

Gambar III.1 Piagam Penghargaan Lomba Arsip Unit Vertikal DJKN



2. Pengelola Kinerja terbaik tahun 2025 di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.

Gambar III.2 Piagam Penghargaan Pengelola Kinerja Terbaik Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029 yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2025- 2029.

Pelaksanaan kinerja KPKNL Palembang pada tahun 2025 mendapat predikat istimewa karena 20 (dua puluh) IKU KPKNL Palembang telah tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,84%.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang diterapkan oleh KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dan kolaborasi yang sinergis antara KPKNL dan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sehingga target dapat tercapai.
2. Melakukan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.
3. Selalu menjaga kualitas layanan sesuai dengan janji layanan KPKNL Palembang.
4. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
5. Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara KPKNL dengan para pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan *self awarness* Satuan Kerja terkait dengan optimalisasi Barang Milik Negara, termasuk dalam peningkatan PNBPN dari pengelolaan BMN.
6. Terkait pelayanan Penilaian kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. Penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembandingan; dan
 - b. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
7. Terkait Pengurusan Piutang Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:

- a. melakukan pendekatan secara persuasif kepada debitur/Penanggung Hutang agar tetap melunasi/mengangsur hutangnya; dan
 - b. melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah terus ditingkatkan kepada penyerah piutang;
8. Terkait Lelang kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
- a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang representatif dan *marketable*.
9. Selalu berupaya untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Segala yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama semua pegawai KPKNL Palembang, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Dalam upaya menjaga komitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Palembang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Palembang ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun semua jajaran di lingkungan KPKNL Palembang. Akhir kata “Tiada gading yang tak retak”, KPKNL Palembang dengan kerendahan hati menerima saran/masukan yang konstruktif untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi DJKN tercinta.

LAMPIRAN

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Palembang Tahun 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV						
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-								109.45	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100.00	105.29	19.00%	57.58%	105.32	105.32	60.64	109.45
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100.00%	115.05%	14.00%	42.42%	115.05	115.05	48.81	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-								115.13	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	106.67%	19.00%	36.54%	106.67	106.67	38.97	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	125.68%	19.00%	36.54%	125.68	120.00	43.85	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	366.05%	14.00%	26.92%	366.05	120.00	32.31	117.56
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120.00	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77.00	93.67	14.00%	50.00%	121.65	120.00	60.00	
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	116.57	14.00%	50.00%	157.52	120.00	60.00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								110.60	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipatkan	Max	P/M	100.00%	101.21%	14.00%	50.00%	101.21	101.21	50.60	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100.00%	120.00%	14.00%	50.00%	120.00	120.00	60.00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-								120.00	115.30
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	Max	P/M	100%	151.14%	14.00%	33.33%	151.14	120.00	40.00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	99.48%	14.00%	33.33%	142.12	120.00	40.00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80.00%	115.41%	14.00%	33.33%	144.26	120.00	40.00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120.00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100.00	125.22	14.00%	33.33%	125.22	120.00	40.00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80.00%	97.55%	14.00%	33.33%	121.93	120.00	40.00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								117.28	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100.00	114.55	14.00%	50.00%	114.55	114.55	57.28	118.66
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80.00	116.25	14.00%	50.00%	145.31	120.00	60.00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-								118.70	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80.00	97.33	14.00%	33.33%	121.66	120.00	40.00	
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Max	P/M	95.30%	110.65%	14.00%	33.33%	116.11	116.11	38.70	
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100.00	132.52	14.00%	33.33%	132.52	120.00	40.00	
NKO											114.84



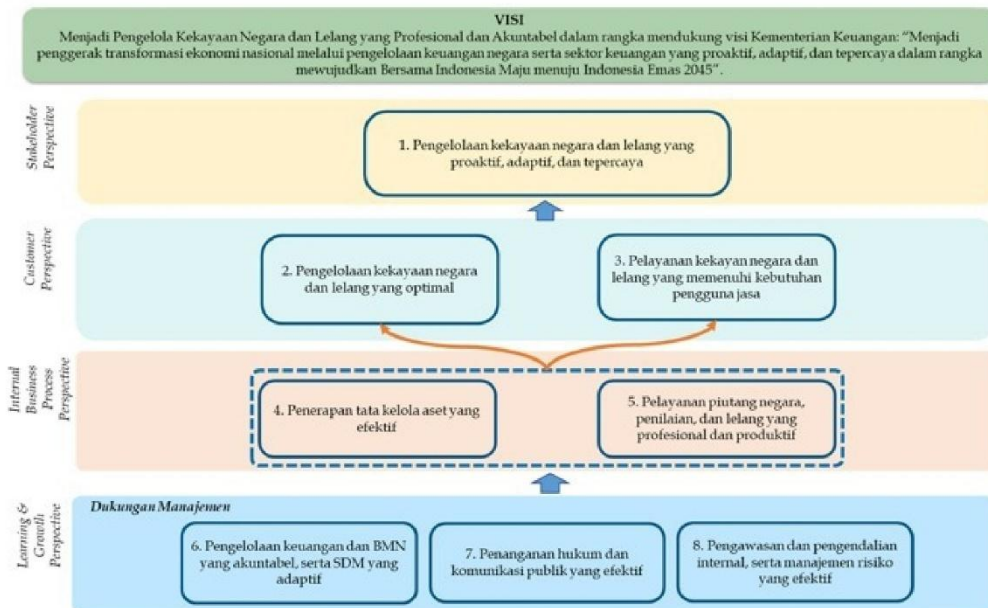
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-02/WKN.04/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp47,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp441,3 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp900 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	100%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,3%
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Program/Kegiatan 2025	Anggaran
Program:	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp816,726,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp74,229,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp0
3. Pengelolaan Aset	Rp742,497,000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp0
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp0
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp0
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp1,804,158,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp37,938,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,700,708,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp38,976,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp26,536,000
5. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp0

Kota Palembang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi,
dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Palembang



Ditandatangani Secara Elektronik
Mardhanus Rudiyanto



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp47,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp441,3 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp900 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Palembang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang



Ditandatangani Secara Elektronik
Mardhanus Rudiyanto



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Palembang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang



Ditandatangani Secara Elektronik
Mardhanus Rudiyanto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR : PK-02A/WKN.04/2025**

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas perjanjian kinerja nomor PK-02/WKN.04/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp47,4 M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp54,7 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp441,3 M)	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp750,4 M)
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100% (8)	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100% (8,8)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

		Sebelum							Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp47,4 M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp54,7 M)
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp441,3 M)	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp750,4 M)
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (8)	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (8,8)

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong

Palembang, 17 November 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Mardhanus Rudiyanto

